



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN**

**NOMOR : 13 /PKS/KS/I.04/2023
19 /DPRD-P/II.01/2023**
TANGGAL : 04 September 2023

**TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR : 13/PKS/KS/I.04/2023
19/DPRD-P/II.01/2023

TANGGAL : 04 September 2023

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. H. DENDI RAMADHONA K, S.T.,M.Tr.I.P.**
Jabatan : Bupati Pesawaran
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap – Gedung Tataan

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

2. a. Nama : **SUPRAPTO**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran
Alamat Kantor : Jalan Raya Kedondong Desa Way Layap – Gedung Tataan
- b. Nama : **PAISALUDDIN, S.H.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran
Alamat Kantor : Jalan Raya Kedondong Desa Way Layap – Gedung Tataan
- c. Nama : **YASSER SYAMSURYA RYACUDU, S.E., M.M.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran
Alamat Kantor : Jalan Raya Kedondong Desa Way Layap – Gedung Tataan
- d. Nama : **ZULKARNAIN.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran
Alamat Kantor : Jalan Raya Kedondong Desa Way Layap – Gedung Tataan

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023, Perubahan Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Gedong Tataan, 04 September 2023

BUPATI PESAWARAN

selaku,
PIHAK PERTAMA,



Dr. H. DENDI RAMADHONA K, S.T.,M.Tr.I.P.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**

selaku,
PIHAK KEDUA



**SUPRAPTO.
KETUA**


**PAISALUDIN, S.H.
WAKIL KETUA**


**YASSER SYAMSURYA RYACUDU, S.E., M.M.
WAKIL KETUA**


**ZULKARNAIN.
WAKIL KETUA**

Tabel 3.1
Perubahan Prioritas Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	408.117.867.860	407.117.867.860	(1.000.000.000)	
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	408.117.867.860	407.117.867.860	(1.000.000.000)	
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	147.883.552.066	147.708.377.066	(175.175.000)	
5	Dinas Kesehatan	82.236.485.850	82.061.310.850	(175.175.000)	
6	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah	23.301.760.000	23.301.760.000	0	
7	BLUD Puskesmas Gedong Tataan	4.293.062.609	4.293.062.609	0	
8	BLUD Puskesmas Roworejo	2.954.076.535	2.954.076.535	0	
9	BLUD Puskesmas Bernung	2.857.013.035	2.857.013.035	0	
10	BLUD Puskesmas Trimulyo	2.675.810.065	2.675.810.065	0	

*Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Tahun Anggaran 2023*

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
11	BLUD Puskesmas Tegineneng	2.984.862.618	2.984.862.618	0	
12	BLUD Puskesmas Kedondong	3.781.255.080	3.781.255.080	0	
13	BLUD Puskesmas Kota Dalam	2.845.902.020	2.845.902.020	0	
14	BLUD Puskesmas Bunut	2.954.673.947	2.954.673.947	0	
15	BLUD Puskesmas Padang Cermin	3.388.285.663	3.388.285.663	0	
16	BLUD Puskesmas Hanura	3.952.582.226	3.952.582.226	0	
17	BLUD Puskesmas Pedada	2.482.378.525	2.482.378.525	0	
18	BLUD Puskesmas Kalirejo	3.290.586.496	3.290.586.496	0	
19	BLUD Puskesmas Maja	1.909.505.965	1.909.505.965	0	
20	Puskesmas Gunung Sari	1.975.311.432	1.975.311.432	0	
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	157.146.191.148	149.146.191.148	(8.000.000.000)	

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	30.302.772.420	30.302.772.420	0	
24	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	30.302.772.420	30.302.772.420	0	
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	17.751.497.410	17.655.847.410	(95.650.000)	
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	14.536.365.590	14.536.365.590	0	
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.215.131.820	3.119.481.820	(95.650.000)	
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	3.390.100.344	3.350.100.344	(40.000.000)	
29	Dinas Sosial	3.390.100.344	3.350.100.344	(40.000.000)	

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
30	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.118.177.800	1.102.777.800	(15.400.000)	
32	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.118.177.800	1.102.777.800	(15.400.000)	
33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.371.004.276	3.341.004.276	(30.000.000)	
34	Dinas Ketahanan Pangan	3.371.004.276	3.341.004.276	(30.000.000)	
35	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	25.000.000	25.000.000	0	
36	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	25.000.000	25.000.000	0	
37	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	5.329.068.564	5.279.068.564	(50.000.000)	

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
38	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	5.329.068.564	5.279.068.564	(50.000.000)	
39	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.981.642.984	3.931.642.984	(50.000.000)	
40	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.981.642.984	3.931.642.984	(50.000.000)	
41	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.684.215.198	4.684.215.198	0	
42	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	4.684.215.198	4.684.215.198	0	
	dan Desa				
43	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.169.688.090	12.085.088.090	(84.600.000)	

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
44	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.169.688.090	12.085.088.090	(84.600.000)	
45	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	9.182.772.120	9.157.772.120	(25.000.000)	
46	Dinas Perhubungan	9.182.772.120	9.157.772.120	(25.000.000)	
47	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.387.330.580	12.337.330.580	(50.000.000)	
48	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	12.387.330.580	12.337.330.580	(50.000.000)	
49	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.092.099.226	4.052.099.226	(40.000.000)	
50	Dinas Koperasi, Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	4.092.099.226	4.052.099.226	(40.000.000)	
51	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.165.179.748	5.065.179.748	(100.000.000)	

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
52	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.165.179.748	5.065.179.748	(100.000.000)	
53	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
		4.589.136.430	5.438.636.430	849.500.000	
54	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.589.136.430	5.438.636.430	849.500.000	
55	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
		143.000.000	143.000.000	0	
56	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	143.000.000	143.000.000	0	
57	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
		19.276.000	19.276.000	0	
58	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	19.276.000	19.276.000	0	
	BIDANG KEBUDAYAAN				
60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.206.858.900	1.206.858.900	0	
61	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
		14.621.746.450	14.521.746.450	(100.000.000)	
62	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14.621.746.450	14.521.746.450	(100.000.000)	

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
63	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
		303.000.000	303.000.000	0	
64	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	303.000.000	303.000.000	0	
65	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
66	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		3.668.333.772	3.658.333.772	(10.000.000)	
67	Dinas Perikanan	3.668.333.772	3.658.333.772	(10.000.000)	
68	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
		4.990.254.770	4.990.254.770	0	
69	Dinas Pariwisata	4.990.254.770	4.990.254.770	0	
70	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
		24.348.900.074	23.828.900.074	(520.000.000)	
71	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	17.224.134.866	16.724.134.866	(500.000.000)	
72	Dinas Perkebunan dan Peternakan	7.124.765.208	7.104.765.208	(20.000.000)	
73	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
		7.854.871.050	7.055.871.050	(799.000.000)	

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
74	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.854.871.050	7.055.871.050	(799.000.000)	
75	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.323.735.000	1.323.735.000	0	
76	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.323.735.000	1.323.735.000	0	
77	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
78	SEKRETARIAT DAERAH	54.428.968.499	59.924.168.499	5.495.200.000	
79	Bagian Tata Pemerintahan	200.000.000	192.500.000	(7.500.000)	
80	Bagian Kesejahteraan Rakyat	7.722.600.000	11.780.300.000	4.057.700.000	
81	Bagian Hukum	200.000.000	300.000.000	100.000.000	
82	Bagian Kerja Sama	200.000.000	192.500.000	(7.500.000)	
84	Bagian Administrasi Pembangunan	300.000.000	292.500.000	(7.500.000)	
85	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	590.000.000	582.500.000	(7.500.000)	
86	Bagian Sumber Daya Alam	200.000.000	192.500.000	(7.500.000)	
87	Bagian Umum	29.970.499.906	31.370.499.906	1.400.000.000	
88	Bagian Organisasi	500.000.000	492.500.000	(7.500.000)	

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
89	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.576.000.000	2.566.000.000	(10.000.000)	
90	Bagian Perlengkapan	11.769.868.593	11.769.868.593	0	
91	SEKRETARIAT DPRD	54.000.000.000	52.146.768.500	(1.853.231.500)	
92	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	54.000.000.000	52.146.768.500	(1.853.231.500)	
93	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
94	PERENCANAAN	6.401.222.767	6.151.222.767	(250.000.000)	
95	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.401.222.767	6.151.222.767	(250.000.000)	
96	KEUANGAN	282.417.619.125	280.021.374.659	(2.396.244.466)	
97	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	272.598.525.547	270.298.525.547	(2.300.000.000)	
98	Badan Pendapatan Daerah	9.819.093.578	9.722.849.112	(96.244.466)	
99	KEPEGAWAIAN	5.137.957.276	5.203.132.276	65.175.000	
100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.137.957.276	5.203.132.276	65.175.000	

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
101	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	63.000.000	53.000.000	(10.000.000)	
102	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
		63.000.000	53.000.000	(10.000.000)	
103	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.717.243.118	2.707.243.118	(10.000.000)	
104	Badan Penelitian dan				
		2.717.243.118	2.707.243.118	(10.000.000)	
105	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
106	INSPEKTORAT DAERAH	9.084.904.098	9.074.904.098	(10.000.000)	
107	Inspektorat	9.084.904.098	9.074.904.098	(10.000.000)	
109	KECAMATAN	18.285.208.348	18.175.208.348	(110.000.000)	
110	Kecamatan Gedongtataan	1.980.542.208	1.970.542.208	(10.000.000)	
111	Kecamatan Negeri Katon	1.741.610.622	1.731.610.622	(10.000.000)	
112	Kecamatan Way Lima	1.683.186.144	1.673.186.144	(10.000.000)	
113	Kecamatan Padang Cermin	1.681.978.884	1.671.978.884	(10.000.000)	
114	Kecamatan Punduh Pedada	1.464.403.218	1.454.403.218	(10.000.000)	

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
115	Kecamatan Kedondong	1.747.895.890	1.737.895.890	(10.000.000)	
116	Kecamatan Marga Punduh	1.583.207.708	1.573.207.708	(10.000.000)	
117	Kecamatan Way Khilau	1.542.800.568	1.532.800.568	(10.000.000)	
118	Kecamatan Teluk Pandan	1.597.648.624	1.587.648.624	(10.000.000)	
119	Kecamatan Tegineneng	1.819.030.280	1.809.030.280	(10.000.000)	
120	Kecamatan Way Ratai	1.442.904.202	1.432.904.202	(10.000.000)	
121	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
122	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.739.121.330	9.739.121.330	2.000.000.000	
123	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.739.121.330	9.739.121.330	2.000.000.000	